

Analisis Tingkat Ketimpangan Dan Karakteristik Sosial Ekonomi Penduduk

Rafly Parenta Bano

Badan Pusat Statistik Kabupaten Merauke

Email: rbano@bps.go.id

ABSTRAK

Meskipun tingkat kemiskinan terus menurun, tren ketimpangan di Kabupaten Merauke cenderung fluktuatif dan meningkat dibandingkan tahun 2007. Padahal pertumbuhan ekonomi Kabupaten Merauke konsisten di atas 7 persen sejak tahun 2011 dan kontribusi sektor pertanian mencapai seperempat dalam PDRB. Selain karena minimnya penelitian mengenai tingkat ketimpangan di Kabupaten Merauke, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat ketimpangan penduduk menurut ukuran Bank Dunia dan mengetahui karakteristik sosial ekonomi setiap kelompok penduduk. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk menjawab dengan lebih jelas tujuan penelitian dimaksud. Hasilnya, tingkat ketimpangan penduduk di Kabupaten Merauke pada tahun 2017 tergolong sedang. Sementara itu, penduduk berpendapatan rendah sebagian besar tinggal di desa, lebih cenderung mengalokasikan pendapatannya untuk mengonsumsi makanan namun minim kalori, menerima raskin dan tidak menerima Kartu Perlindungan Sosial. Temuan penting dalam penelitian ini yaitu bahwa aksesibilitas penduduk berpendapatan rendah terhadap program perlindungan sosial masih rendah. Sehingga perlu adanya evaluasi implementasi program tersebut agar tepat sasaran.

Kata kunci: Pendapatan; Ketimpangan; Kemiskinan.

ABSTRACT

Although the poverty rate continues to decline, the trend of inequality in Merauke Regency tends to fluctuate and increase compared to 2007. Whereas the economic growth of Merauke Regency is consistently above 7 percent in 2011 and the contribution of the agricultural sector reaches a quarter in GRDP. In addition to the lack of research on the level of inequality in Merauke Regency, this research was conducted with the aim to find out the level of population inequality according to the World Bank's size and to understand the socio-economic characteristics of each population group. This study uses descriptive analysis to answer more clearly the purpose of this study. As a result, the level of inequality in Merauke Regency in 2017 is classified as moderate. Meanwhile, the low-income population mostly lives in the village, more likely to allocate income to consume food but less calorie, accept raskin but did not receive a Social Protection Card. An important finding in this study is that the accessibility of low-income populations to social protection programs is still low. So it is necessary to evaluate the implementation of the program to be on target.

Keyword: Income; Inequality; Poverty.

PENDAHULUAN

Meskipun tingkat kemiskinan di Kabupaten Merauke berhasil diturunkan hingga tahun 2018, namun tren penurunannya stagnan hingga mendekati nol. Data BPS Provinsi

Papua menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Merauke terus menurun sejak tahun 2006. Namun tren penurunannya tidak melebihi satu persen sejak tahun 2014 lalu [1]. Sementara tingkat ketimpangan cenderung fluktuatif dan menunjukkan tren meningkat dibandingkan tahun 2007 [2]. Temuan tersebut sejalan dengan pengantar Rodrigo A. Chaves (Direktur Bank Dunia di Indonesia) yang termuat dalam publikasi Bank Dunia bahwa pengentasan kemiskinan di Indonesia mulai stagnan sejak tahun 2014 dan ketimpangan pendapatan naik dengan cepat [3].

Mengkaji lebih dalam soal tingkat ketimpangan di Kabupaten Merauke menjadi semakin menarik tatkala fakta data BPS yang menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Merauke yang konsisten di atas 7 persen sejak tahun 2011 [4], nyatanya tidak mampu memangkas kemiskinan secara cepat dan mengikis ketimpangan pendapatan. Padahal tingginya kontribusi sektor pertanian dalam PDRB Kabupaten Merauke sejatinya dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan di wilayah perdesaan yang jadi basis penduduk miskin. Sektor manufaktur belum bertumbuh dengan cepat sehingga belum mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi 1.965 pengangguran dan menurunkan tingkat ketimpangan.

Minimnya kajian atau penelitian soal ketimpangan di Kabupaten Merauke mendorong peneliti untuk melakukan penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat ketimpangan pendapatan penduduk di Kabupaten Merauke pada tahun 2017 menurut ukuran Bank Dunia. Ukuran Bank Dunia dipilih sebab dapat menerangkan lebih jauh tingkat pendapatan setiap kelompok penduduk. Penelitian ini juga bertujuan untuk mendapatkan gambaran lebih jelas tentang karakteristik sosial ekonomi masing-masing kelompok. Karakteristik yang dimaksud antara lain wilayah tempat tinggal, jenis pengeluaran serta akses terhadap program perlindungan sosial.

METODE

Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan pada Bulan Maret Tahun 2017 oleh BPS Kabupaten Merauke. Dalam Susenas, sampel dipilih dengan metode *two stages one phase stratified sampling*. Tahap pertama adalah memilih blok sensus secara PPS (*probability proportional to size*) dengan *size* jumlah rumah tangga dan tahap kedua adalah memilih 10 rumah tangga dari hasil pemutakhiran dalam blok sensus terpilih secara sistematis. Metode analisis yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif. Menurut Ghozali [5], analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan deskripsi atas suatu kelompok data. Lebih jauh, Bano menyebutkan bahwa dalam analisis deskriptif data dapat ditampilkan dalam bentuk tabel

(baik satu arah atau dua arah) maupun grafik [6]. Selain itu, perlu juga menguraikan nilai rata-rata (*mean*), nilai maksimum dan minimum serta nilai range dari suatu data.

Dalam penelitian ini analisis deskriptif digunakan untuk menjabarkan secara rinci tingkat ketimpangan pendapatan penduduk versi Bank Dunia di Kabupaten Merauke tahun 2017, selain itu juga digunakan untuk menganalisis tingkat ketimpangan penduduk menurut karakteristik sosial ekonominya. Variabel sosial ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini adalah tempat tinggal, jenis pengeluaran dan akses terhadap program perlindungan sosial.

Menurut Dengah, dkk [7], pendapatan per kapita suatu negara adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk atau total pendapatan penduduk dibagi jumlah penduduk di suatu negara. Lebih lanjut, Firdaus dan Witomo [8] menjelaskan bahwa penghitungan tingkat pendapatan per kapita pada rumah tangga dilakukan dengan cara mengakumulasi seluruh pendapatan yang diterima oleh anggota rumah tangga dibagi jumlah anggota rumah tangga. Dengan demikian pendapatan per kapita dalam suatu rumah tangga dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$I = \sum_{i=1}^n H_i/n$$

Dimana:

I = pendapatan per kapita dalam suatu rumah tangga

H_i = pendapatan anggota rumah tangga ke-i dalam suatu rumah tangga

n = jumlah anggota rumah tangga dalam suatu rumah tangga

Tahap berikutnya adalah mengakumulasi pendapatan per kapita setiap rumah tangga lalu dikelompokkan menurut klasifikasi dari Bank Dunia, yakni: kelompok 40 persen pendapatan terendah, kelompok 40 persen pendapatan menengah dan kelompok 20 persen

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tingkat ketimpangan Menurut Ukuran Bank Dunia

Salah satu statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan penduduk adalah persentase pendapatan penduduk pada kelompok penduduk persen terendah terhadap total pendapatan penduduk di suatu wilayah. Ukuran tersebut merupakan ukuran versi Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini, tingkat ketimpangan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu ketimpangan tinggi jika persentasenya dibawah 12 persen, ketimpangan sedang jika persentasenya di antara 12-17 persen serta ketimpangan rendah jika persentasenya di atas 17 persen.

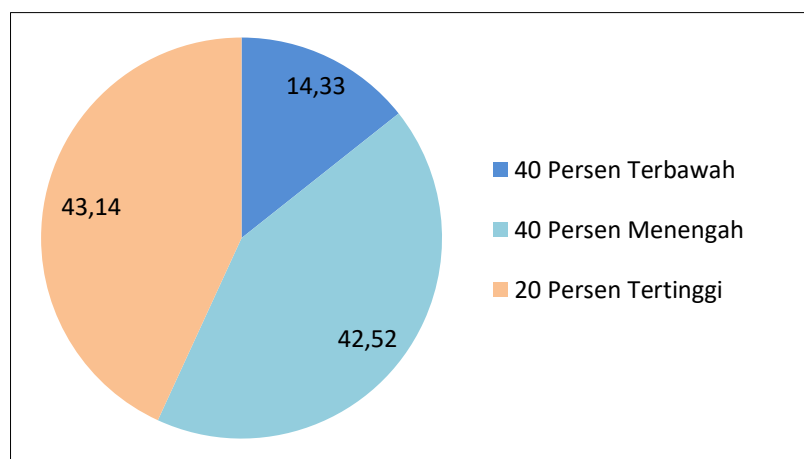
Hasil pengolahan data Susenas 2017 seperti yang ditunjukkan dalam tabel 1 adalah klasifikasi kelompok pendapatan penduduk menurut nilai persentil pengeluaran. Nilai persentil 40 sebesar Rp. 806.784. Sedangkan nilai persentil 80 tercatat sebesar Rp. 1.755.896

Tabel 1. Klasifikasi Pendapatan Penduduk Menurut Nilai Pendapatan Per Kapita

No.	Kelompok Pendapatan	Nilai Pendapatan
(1)	(2)	(3)
1.	Kelompok 40 persen terbawah	≤ 806.784
2.	Kelompok 40 persen menengah	806.785 – 1.755.896
3.	Kelompok 20 persen tertinggi	≥ 1.7955.897

Sumber : Susenas 2017

Setelah diperoleh nilai persentil pengeluaran maka selanjutnya dapat diperoleh unit analisis setiap penduduk menurut kelompok pengeluaran.



Gambar 1. Ukuran Ketimpangan menurut Bank Dunia di Kabupaten Merauke Tahun 2017
 Sumber: Susenas 2017

Hasilnya adalah berdasarkan gambar 1 persentase pendapatan kelompok penduduk 40 persen terendah terhadap total pendapatan penduduk sebesar 14,33 persen. Sementara persentase pendapatan kelompok 40 persen menengah dan kelompok 20 persen tertinggi terhadap total pendapatan penduduk masing-masing sebesar 42,52 persen dan 43,14 persen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat ketimpangan di Kabupaten Merauke tahun 2017 berada pada kategori sedang.

Tabel 2 Rata-rata pendapatan sebulan penduduk dari kelompok 40 persen terendah di Kabupaten Merauke tahun 2017 sebesar Rp. 429.219. Hal itu berarti rata-rata pendapatan sehari sebesar Rp. 14.307. Pendapatan terendah penduduk dalam kelompok tersebut sebesar Rp. 190.300 dan yang tertinggi sebesar Rp. 798.592. Jika dibandingkan dengan rata-rata pendapatan dari kelompok menengah dan tinggi, rata-rata pendapatan sebulan dari

kelompok menengah mencapai tiga kali lipat. Sedangkan terhadap rata-rata pendapatan per bulan dari kelompok 20 persen tertinggi mencapai enam kali lipat. Rata-rata pendapatan per bulan penduduk dari kelompok 40 persen menengah sebesar Rp. 1.258.974 dan dari kelompok 20 persen tertinggi sebesar Rp. 2.545.956.

Tabel 2. Nilai Rata-rata, Minimum dan Maksimum Pendapatan per Bulan setiap Kelompok Penduduk di Kabupaten Merauke Tahun 2017 (Rupiah)

No	Kelompok Penduduk	Nilai Rata-rata	Nilai Minimum	Nilai Maksimum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	40 Persen Terendah	429.219	190.300	798.592
2.	40 Persen Menengah	1.258.974	806.785	1.752.315
3.	20 Persen Tertinggi	2.545.956	1.755.896	12.354.097

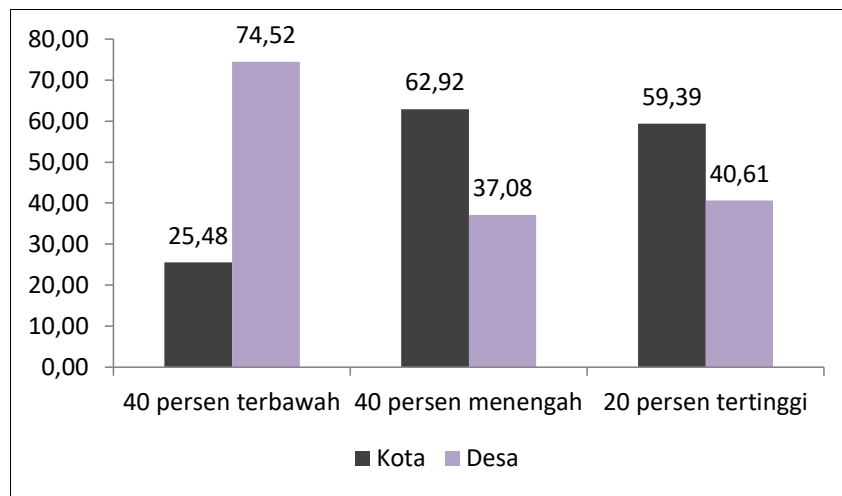
Sumber: Susenas 2017

Jika melihat nilai *range* (selisih nilai maksimum dan minimum) pendapatan tiap kelompok maka nilai tertinggi berasal dari kelompok 20 persen tertinggi yaitu sebesar Rp. 10.598.201. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendapatan pada kelompok 20 persen tertinggi relatif lebih terdispersi dibandingkan dua kelompok lainnya, dengan kata lain dalam kelompok 20 persen tertinggi ketimpangan pendapatan per bulan penduduk relatif tinggi. Sementara *range* pendapatan kelompok 40 persen terendah dan kelompok 40 persen menengah masing-masing sebesar Rp. 608.292 dan Rp. 945.530

B. Karakteristik Tingkat Ketimpangan Menurut Tempat Tinggal

Hasil olah data Susenas tahun 2017 menunjukkan bahwa di Kabupaten Merauke tingkat ketimpangan antara wilayah perdesaan dan perkotaan cukup tinggi. Dalam gambar 2 ditunjukkan bahwa sekitar 74,52 persen penduduk dari kelompok 40 persen pendapatan terendah tinggal di wilayah perdesaan. Sedangkan hanya 25,48 persen saja yang tinggal di kota. Artinya perdesaan didominasi penduduk dengan pendapatan yang terendah.

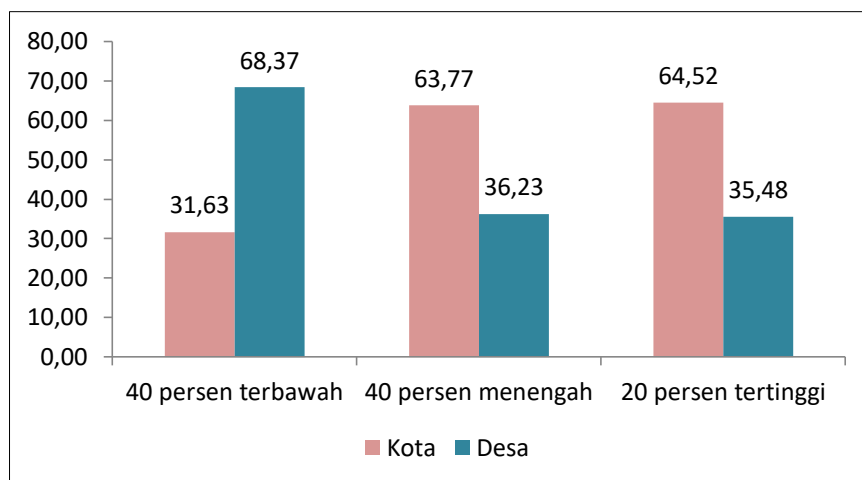
Sementara di kelompok pendapatan menengah dan tinggi didominasi oleh penduduk perkotaan. Sekitar 62,92 persen penduduk dari kelompok 40 persen pendapatan menengah dan 59,39 persen penduduk dari kelompok 20 persen pendapatan tertinggi tinggal di daerah perkotaan. Menariknya, empat dari sepuluh orang yang pendapatannya tertinggi adalah masyarakat perdesaan. Artinya tingkat ketimpangan pendapatan penduduk di wilayah perdesaan juga tinggi mengingat fakta bahwa tiga dari empat orang berpendapatan terendah tinggal di desa.



Gambar 2. Persentase Penduduk Menurut Wilayah Tempat Tinggal dan Kelompok Pendapatan di Kabupaten Merauke Tahun 2017

Sumber: Susenas 2017

Selanjutnya jika melihat total pendapatan, dari kelompok 40 terendah didominasi pendapatan penduduk di wilayah perdesaan, persentasenya mencapai 68,37 persen. Tingkat kesejahteraan di perkotaan masih lebih tinggi dibandingkan di perdesaan. Hal tersebut tercermin dari persentase total pendapatan masyarakat perkotaan yang dominan pada kelompok pendapatan menengah maupun kelompok pendapatan tertinggi. Sekitar 63,77 persen dari total pendapatan penduduk pada kelompok menengah adalah pendapatan penduduk perkotaan. Sementara sekitar 64,52 persen pendapatan penduduk terkaya adalah pendapatan penduduk yang tinggal di kota.



Gambar 3. Distribusi Pendapatan Penduduk Kelompok 40 Persen Terendah Menurut Wilayah Tempat Tinggal di Kabupaten Merauke Tahun 2017

Sumber: Susenas 2017

Kemampuan ekonomi penduduk di wilayah perdesaan di Kabupaten Merauke masih jauh lebih rendah dibandingkan kemampuan ekonomi penduduk yang tinggal di kota.

Tercatat sepertiga pendapatan dari total pendapatan pada setiap kelompok pendapatan menengah dan tinggi adalah pendapatan penduduk perdesaan. Hal tersebut mengindikasikan rendahnya aksesibilitas penduduk perdesaan terhadap kegiatan perekonomian sehingga kesulitan untuk meningkatkan pendapatan mereka.

Rendahnya aksesibilitas penduduk disebabkan minimnya infrastruktur perekonomian di wilayah perdesaan di Kabupaten Merauke. Infrastruktur yang dimaksud antara lain berupa lembaga keuangan, sarana penunjang perekonomian, industri kecil dan mikro, fasilitas perkreditan, kelompok pertokoan, pasar dan kios sarana produksi pertanian, sarana perdagangan dan akomodasi, serta koperasi. Berdasarkan hasil Pendataan Potensi Desa tahun 2018, terdapat 190 desa/kelurahan di Kabupaten Merauke.

Dari jumlah tersebut pada tabel 3 dapat ditunjukkan bahwa infrastruktur perekonomian masih terbilang rendah khususnya di wilayah perdesaan. Tercatat sekitar 90 persen desa di Kabupaten Merauke belum memiliki Bank dan 93,16 persen desa belum memiliki pasar. Bahkan hanya 10,00 persen desa yang memiliki infrastruktur sarana produksi pertanian non KUD/BUMDes.

Tabel 3. Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki Infrastruktur Perekonomian di Kabupaten Merauke Tahun 2018

No	Jenis Infrastruktur Perekonomian	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Koperasi Unit Desa	7	3,68
2.	Warung Makanan	64	33,68
3.	Toko/Warung Kelontong	153	80,53
4.	Penginapan	9	4,74
5.	Tidak ada Pasar dan Kelompok Pertokoan	177	93,16
6.	Sarana Produksi Pertanian non KUD/BUMDes	19	10,00
7.	Kredit Usaha Rakyat (KUR)	81	42,63
8.	Industri dari Kayu	51	26,84
9.	Industri Makanan dan Minuman	43	22,63
10.	Tidak ada Bank	171	90,00
11.	Bengkel Motor/Mobil	68	35,79

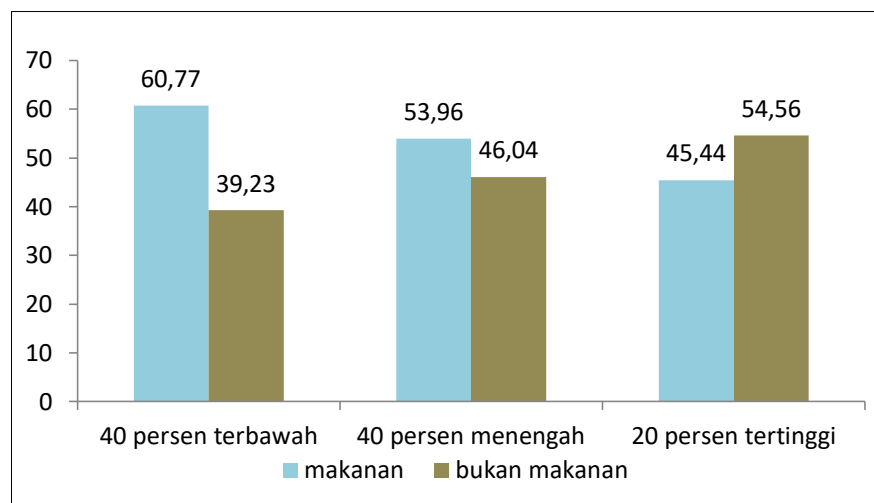
Sumber : Podes Papua, 2018

Minimnya infrastruktur tersebut membuat kemampuan desa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan penduduk sangat rendah. Sehingga secara perlahan dapat mengikis ketimpangan pendapatan antara penduduk perdesaan dan perkotaan. Hal

tersebut didukung oleh simpulan dari penelitian yang dilakukan Iswanto [9], bahwa membangun konektivitas ekonomi antar daerah dengan pembangunan infrastruktur dapat menyebabkan transfer sumber daya alam dan tenaga kerja akan lebih efisien. Namun tidak dipungkiri bahwa kegiatan pembangun infrastruktur pedesaan yakni pembangunan fisik yang telah di buat tidak sesuai dengan desain yang telah di tetapkan oleh karena tidak maksimalnya pihak-pihak terkait memainkan perannya[10]. Pembangunan infrastruktur dapat pula ditunjang dengan dana CSR perusahaan namun hambatan yang dialami perusahaan dalam melaksanakan CSR selain hambatan internal yakni keterbatasan dana program CSR sehingga tidak dapat sekaligus memenuhi kebutuhan yang ada, terdapat hambatan eksternal yakni hubungan dengan masyarakat dan pemerintah setempat [11].

C. Karakteristik Tingkat Ketimpangan Menurut Jenis Pengeluaran

Bila melihat karakteristik menurut jenis pengeluaran maka semakin tinggi pendapatan penduduk di Kabupaten Merauke maka persentase pengeluaran makanan akan semakin lebih rendah dibanding persentase pengeluaran bukan makanan. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurhayani [12] menyimpulkan bahwa seiring dengan meningkatnya tingkat pendapatan maka semakin tinggi kemungkinan pergeseran dari pengeluaran makanan ke pengeluaran non makanan. BPS [2] dalam publikasinya juga menjelaskan bahwa pada kondisi pendapatan terbatas, kebutuhan makanan didahulukan. Penduduk yang tingkat pendapatannya rendah cenderung mengalokasikan sebagian besar pendapatannya untuk membeli makanan. Seiring dengan peningkatan pendapatan, maka perlahan akan terjadi pergeseran pola pengeluaran, yaitu penurunan porsi pendapatan yang dialokasikan untuk membeli makanan dan peningkatan porsi pendapatan untuk membelanjakan kebutuhan bukan makanan.

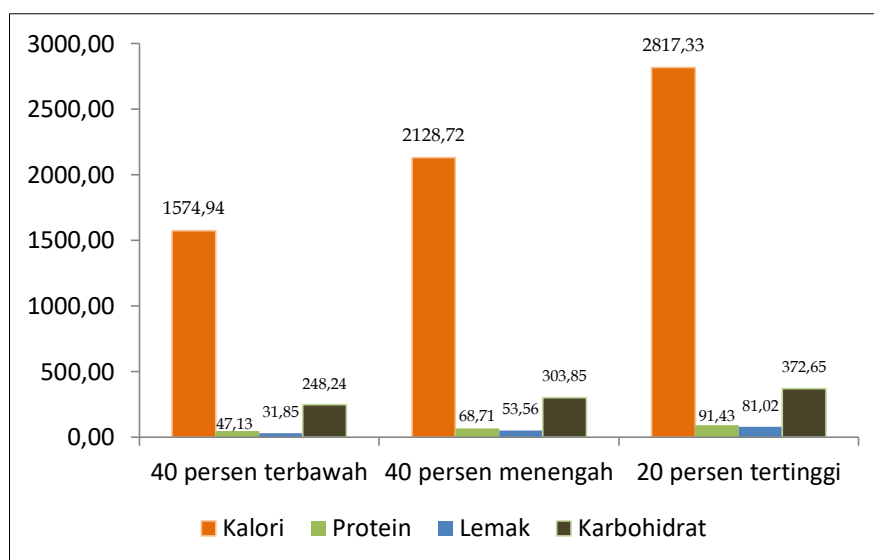


Gambar 4. Persentase Pendapatan Penduduk Menurut Jenis Pengeluaran
Sumber: Susenas 2017

Beranjak dari gambar 4 maka persentase pengeluaran makanan penduduk pada kelompok 40 persen terendah sebesar 60,77 persen. Nilai tersebut lebih tinggi bila dibandingkan persentase pengeluaran makanan dari penduduk pada kelompok menengah dan tinggi. Persentase pengeluaran makanan dari penduduk pada kelompok 40 persen menengah sebesar 53,96 persen. Sedangkan persentase pengeluaran makanan dari kelompok 20 persen tertinggi hanya sebesar 45,44 persen.

Sebaliknya, persentase pengeluaran bukan makanan pada kelompok 40 persen terendah sebesar 39,23 persen. Nilai tersebut lebih rendah bila dibandingkan persentase pengeluaran bukan makanan dari penduduk pada kelompok menengah dan tinggi. Persentase pengeluaran bukan makanan pada kelompok menengah dan tinggi masing-masing sebesar 46,04 persen dan 54,56 persen.

Meskipun persentase pengeluaran makanan penduduk pada kelompok 20 persen tertinggi yang paling rendah, namun jumlah konsumsi kalori mereka adalah yang tertinggi. Gambar 5 menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan penduduk maka konsumsi kalori semakin meningkat. Tak hanya itu, konsumsi setiap sumber kalori seperti protein, lemak dan karbohidrat juga meningkat seiring meningkatnya tingkat pendapatan.



Gambar 5. Rata-rata Jumlah Kalori Sehari yang Dikonsumsi Penduduk
Sumber: Susenas 2017

Pada gambar 5 dapat diuraikan bahwa rata-rata jumlah kalori yang dikonsumsi penduduk dari kelompok 40 persen pendapatan terendah setiap bulan sebesar 1574,94 kkal. Jumlah tersebut hampir separuhnya rata-rata jumlah kalori yang dikonsumsi penduduk dari kelompok 20 persen pendapatan tertinggi yakni sebesar 2817,33 kkal. Sementara rata-rata

jumlah kalori yang dikonsumsi penduduk dari kelompok pendapatan menengah setiap bulan sebesar 2128,72 kkal.

Konsumsi kalori menurut setiap sumber kalori juga meningkat seiring meningkatnya tingkat pendapatan. Rata-rata konsumsi protein per hari dari penduduk pada kelompok pendapatan tertinggi sebesar 91,43 kkal. Jumlah tersebut 2 kali lipat dari rata-rata yang dikonsumsi penduduk dari kelompok pendapatan terendah. Demikian pula rata-rata konsumsi lemak per hari. Rata-rata konsumsi lemak per hari dari penduduk pada kelompok pendapatan tertinggi lebih dari 2,5 kali lipat dari rata-rata yang dikonsumsi penduduk dari kelompok pendapatan terendah. Sedangkan perbandingan rata-rata konsumsi karbohidrat per hari dari penduduk pada dua kelompok tersebut hanya sebesar 1,5.

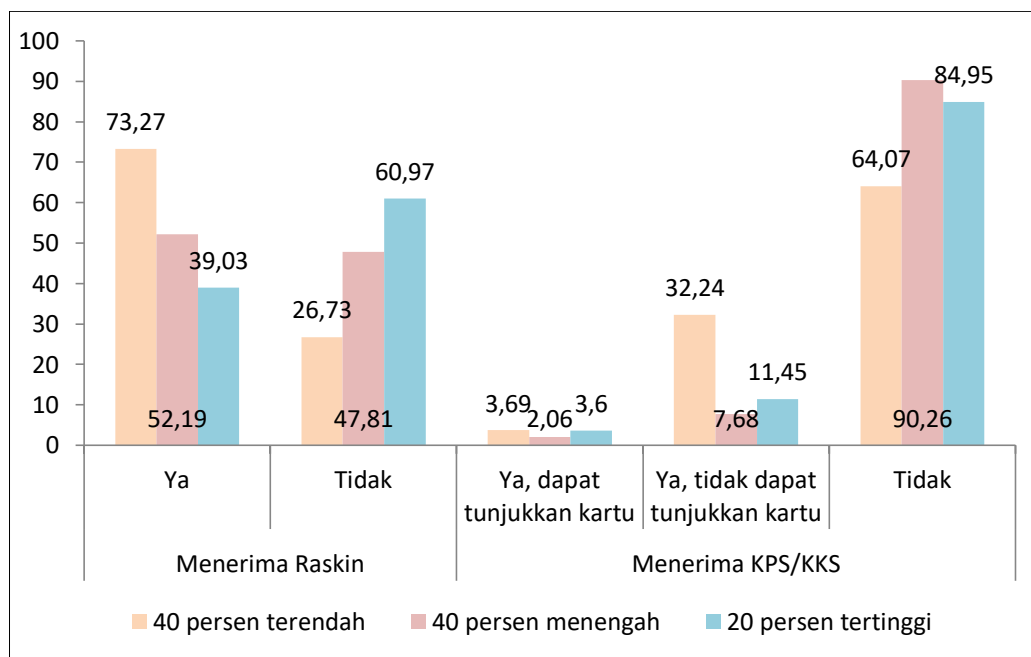
Porsi konsumsi kalori penduduk dari setiap kelompok pendapatan juga berbeda. Penduduk dari kelompok pendapatan terendah mengonsumsi karbohidrat lebih besar yang dikonsumsi oleh penduduk dari kelompok pendapatan tertinggi. Sekitar 75,86 persen dari jenis kalori yang dikonsumsi penduduk dari kelompok pendapatan terendah adalah karbohidrat. Sedangkan porsi karbohidrat yang dikonsumsi penduduk dari kelompok pendapatan tertinggi lebih rendah yaitu sebesar 68,36 persen. Penduduk dari kelompok pendapatan tertinggi lebih cenderung mengonsumsi protein dan lemak lebih banyak dibandingkan yang dikonsumsi penduduk dari kelompok pendapatan terendah dan menengah. Itu berarti semakin tinggi tingkat pendapatan maka porsi konsumsi protein dan lemak akan semakin dinaikkan dan porsi konsumsi karbohidrat semakin dikurangi.

D. Karakteristik Tingkat Ketimpangan Menurut Akses Perlindungan Sosial

Hadirnya program perlindungan sosial adalah suatu alternatif solusi untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Dengan kata lain, program perlindungan sosial berupa pemberian bantuan berupa bahan pangan maupun uang tunai ditujukan untuk mendongkrak tingkat kesejahteraan penduduk miskin. Seperti yang ditulis oleh Bank Dunia [13] bahwa keberadaan bantuan sosial bertujuan untuk meringankan beban rumah tangga miskin untuk dapat membuat investasi yang tidak akan mereka lakukan tanpa bantuan sosial tersebut. Bantuan sosial juga dapat mengurangi ketimpangan dengan cara meningkatkan aksesibilitas bagi penduduk miskin ke layanan dan sumber daya yang mereka butuhkan untuk keluar dari jerat kemiskinan.

Dua dari beberapa program yang diluncurkan pemerintah yakni beras miskin atau beras sejahtera (raskin/rastra) dan kartu perlindungan sosial atau kartu keluarga sejahtera (KPS/KKS). Namun dalam implementasinya di masyarakat, kedua program tersebut tidak berjalan tepat sasaran. Termasuk implementasi kedua program tersebut di Kabupaten Merauke tahun 2017, Program yang seharusnya diperuntukkan untuk penduduk yang

pendapatannya rendah masih dapat dinikmati pula oleh penduduk yang tergolong tinggi pendapatannya. Bahkan, masih relatif banyak penduduk yang pendapatannya rendah tidak menikmati program tersebut.



Gambar 6. Persentase Penduduk Menurut Akses Perlindungan Sosial di Kabupaten Merauke Tahun 2017
 Sumber: Susenas 2017

Dalam gambar 6 jelas diperlihatkan bahwa pada tahun 2017 di Kabupaten Merauke tercatat persentase penduduk berpendapatan rendah yang menerima manfaat program raskin sebesar 73,27 persen. Sementara persentase penduduk berpendapatan tinggi yang menerima raskin relatif cukup tinggi yaitu sebesar 39,03 persen. Sedangkan persentase penduduk dari kelompok pendapatan terendah yang tidak menerima manfaat raskin juga cukup tinggi yakni sebesar 26,73 persen. Hal tersebut menegaskan bahwa implementasi program raskin belum tepat sasaran.

Selain raskin, program lainnya yaitu kartu perlindungan sosial yang diperuntukkan bagi penduduk miskin untuk mendapatkan bantuan uang tunai. Artinya, bila tidak memiliki kartu maka tidak dapat menerima manfaat bantuan uang tunai. Namun sama halnya dengan raskin, penerapan program tersebut tidak tepat sasaran. Tercatat sekitar 15,05 persen penduduk berpendapatan tinggi menerima KPS/KKS. Sedangkan 64,07 persen penduduk berpendapatan rendah tidak menerima kartu tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan penduduk di Kabupaten Merauke pada tahun 2017 berada pada kategori sedang. Mayoritas penduduk yang pendapatannya rendah tinggal di wilayah perdesaan. Minimnya infrastruktur perekonomian di wilayah perdesaan jadi pemicu rendahnya aksesibilitas penduduk untuk meningkatkan tingkat pendapatan mereka. Selain itu, karena rendahnya tingkat pendapatan maka porsi konsumsi penduduk berpendapatan terendah paling tinggi adalah konsumsi makanan. Namun, konsumsi jumlah kalori mereka jauh lebih rendah dibandingkan yang dikonsumsi oleh penduduk berpendapatan menengah dan tinggi. Sementara di sisi lainnya, aksesibilitas penduduk berpendapatan rendah terhadap perlindungan sosial cukup rendah. Hal tersebut mengindikasikan kuat bahwa implementasi program perlindungan sosial yang belum tepat sasaran. Oleh karena itu, melalui tulisan ini penulis merekomendasikan agar implementasi program perlindungan sosial dievaluasi secara menyeluruh agar dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

Penelitian ini terbatas pada tiga variabel sosial ekonomi karena penelitian ini merupakan penelitian pertama yang secara spesifik mengkaji mengenai persoalan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Merauke. Sejatinya mengkaji persoalan ketimpangan memerlukan sejumlah variabel sosial ekonomi lainnya. Variabel yang dimaksud tentu yang mungkin berkorelasi kuat seperti variabel lapangan pekerjaan kepala rumah tangga, tingkat pendidikan kepala rumah tangga hingga kepemilikan fasilitas perumahan. Kemudian dibuatkan model agar dapat teridentifikasi penyebab tingginya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Badan Pusat Statistik, "Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2002-2018," 2019. [Online]. Available: <https://papua.bps.go.id/dynamictable/2016/10/13/19/persentase-penduduk-miskin>.
- [2] Badan Pusat Statistik, "Rasio Gini Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2007-2017," 2016. [Online]. Available: <https://papua.bps.go.id/dynamictable/2016/10/01/16/rasio-gini>.
- [3] BANK Dunia, "Ketimpangan yang Semakin Lebar," 2015. [Online]. Available: <http://pubdocs.worldbank.org/en/986461460705141518/Indonesias-Rising-Divide-Bahasa-Indonesia.pdf>.
- [4] Badan Pusat Statistik, "[Seri 2010] Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2010-2017," 2018. [Online]. Available: <https://papua.bps.go.id/dynamictable/2018/08/10/246/-seri-2010-laju>.
- [5] G. Imam, "Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS," Semarang Badan Penerbit Univ. Diponegoro, 2005.

- [6] R. P. Bano, "Analisis Laju Pembangunan Manusia di Provinsi Papua Tahun 2015-2017," *Soc. J. Ilmu Adm. dan Sos.*, vol. 8, no. 1, pp. 22-31, 2019.
- [7] S. Dengah, V. Rimate, and A. Niode, "Analisis Pengaruh Pendapatan Perkapita Dan Jumlah Penduduk Terhadap Permintaan Perumahan Kota Manado Tahun 2003-2012," *J. Berk. Ilm. Efisiensi*, vol. 14, no. 3, 2014.
- [8] M. Firdaus and C. M. Witomo, "Analisis Tingkat Kesejahteraan dan Ketimpangan Pendapatan Rumah Tangga Nelayan Pelagis Besar di Sendang Biru, Kabupaten Malang, Jawa Timur," *J. Sos. Ekon. Kelaut. dan Perikan.*, vol. 9, no. 2, pp. 155-168, 2014.
- [9] D. Iswanto, "Ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota dan pertumbuhan ekonomi di Propinsi Jawa Timur," *Signifikan J. Ilmu Ekon.*, vol. 4, no. 1, 2015.
- [10] H. S. M. Slakory, "Evaluasi Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri-Perdesaan Pada Kelurahan Pasir Putih Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari," *J. ILMU Ekon. Sos.*, pp. 1-14, 2017.
- [11] A. P. Tjilen and M. V. I. Herdjiono, "Evaluasi Program Corporate Sosial Responsibility Pada PT. Djarma Aru Di Wanaam," *J. Ilmu Ekon. Sos. Unmus*, vol. 3, no. 6, 2012.
- [12] N. Nurhayani and R. Rosmeli, "Analisis Pendapatan Dan Pengeluaran Perkapita Di Kabupaten Batanghari," *J. Paradig. Ekon.*, no. April, 2012.
- [13] BANK Dunia, "Kajian Kebijakan Pembangunan 2014, Indonesia : Menghindari Perangkap," 2014. [Online]. Available: <https://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/EAP/Indonesia/Indonesia-development-policy-review-2014-bahasa.pdf>.